

RENSTRA/RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 2025 - 2029 ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan, tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih kongkrit dan mudah dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasi diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan selama Lima Tahun ke depan jangka menengah RPJMD Pemerintah bagi kita semua.

Akhirnya kami tim penyusun mengucapkan terimakasih se tinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi kepada tim baik dalam membantu pengumpulan data maupun dalam bentuk pemikiran dalam penyelesaian dokumen Renstra ini.

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan Lima Tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten serta dapat diterima oleh masyarakat Banten pada umumnya.

Serang, April 2025

**Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten,**

Subhan Setiabudi G, SE., M.Si
NIP. 19740706 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Dasar hukum penyusunan	2
3. Maksud dan Tujuan	2
4. Sistematika penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	5
1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
a. Tugas, fungsi dan struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
b. Sumber daya perangkat daerah	13
c. Kelompok sasaran layanan	34
2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34
a. Permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35
c. Isu strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029	37
2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten	37
3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029	38
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029	39

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,DAN KINERJA PEYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN 40

1. Uraian Program 40

2. Uraian Kegiatan

3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 45

4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 78

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83

6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 85

BAB V PENUTUP 87

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Penyusunan Renstra atau Rencana Strategis. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh suatu organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu tertentu atau lima tahun. Renstra dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra adalah singkatan dari Rencana Strategis. Ini adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil, yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan suatu organisasi atau lembaga untuk jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Renstra digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan sebagai berikut :

- a. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD, mengatur tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra PD, termasuk analisis isu strategis, perumusan visi dan misi, serta penentuan tujuan dan sasaran.
- b. Sinkronisasi dengan RPJM Nasional, Menekankan pentingnya sinergi perencanaan pusat dan daerah, memastikan RPJMD daerah selaras dengan RPJM Nasional.
- c. Peran kepala daerah, Mengingatkan kepala daerah terpilih untuk segera menyusun RPJMD dan Renstra PD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- d. Pentingnya Renstra PD, menjelaskan bahwa Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD yang bersifat taktis dan strategis untuk mewujudkan visi dan misi daerah.
- e. Renja perangkat Daerah, Mengamanatkan agar Renstra PD dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja Perangkat Daerah yang bersifat operasional.
- f. Penyediaan dana, Mengimbau Pemda untuk menyediakan dana dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan, termasuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota.

Selanjutnya nilai strategis Renstra (Rencana Strategis) tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok suatu instansi pemerintah atau organisasi dalam jangka waktu lima tahun. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membantu organisasi dalam mengambil keputusan strategis.

2. Dasar hukum penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010;
- 2) Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
- 4) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- 9) Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor : 14);
- 10) Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45.

3. Maksud dan Tujuan

- a Maksud dari pedoman penyusunan Renstra yaitu:
 - a) Sebagai acuan bagi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika, dan subsatnsi; dan
 - b) Sebagai upaya menyelaraskan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Renstra Tahun 2025-2029.
- b Tujuan dari pedoman penyusunan Renstra ini yaitu:

- a) Tersusunnya Renstra Tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah; dan
- b) Tersusunnya Renstra Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, pembinaan sosialisasi terhadap masyarakat, fasilitasi dan pengembangan terhadap integritas nasional.

4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2025-2029, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra OPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1) Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra perangkat daerah.
- 2) Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
- 3) Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.
- 4) Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1) Subbab gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b Sumber daya perangkat daerah
 - c Kinerja pelayanan perangkat daerah
 - d Kelompok sasaran layanan
- 2) Subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- 1 Tujuan Renstra Provinsi 2025-2029
- 2 Sasaran Renstra perangkat daerah Provinsi 2025-2029
- 3 Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

- 4 Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Urusan program
2. Urusan kegiatan
3. Urusan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok adalah **“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”**.

a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

a.1 Kepala Badan

Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik, dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
- d) Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e) Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- f) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- g) Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan politik;
- b) Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja;
- c) Merumuskan dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) secara tepat pada penetapan kinerja (TAPKIN);
- d) Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
- e) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;
- f) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusakan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- g) Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis melalui kewaspadaan nasional;
- h) Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
- i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik dan ketahanan sosial ekonomi;
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- k) Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- l) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam

pelaksanaan tugas;

m) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

a.2 Sekretaris Badan

Sesuai dengan Pasal 617 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d) Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- e) Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- g) Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya **Sekretaris**, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d) Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- e) Meyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f) Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g) Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

- h) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
- i) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten membawahkan:

1).Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- b) Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- c) Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- d) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- f) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- g) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- h) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- j) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

a.4 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Pasal 621 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
- c) Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja bidang;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- c) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
- d) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
- e) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
- f) Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
- g) Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- k) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

a.5 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Sesuai dengan Pasal 630 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan politik untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan pembinaan politik;
- b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik dan penyelenggaraan Pemilu;
- c) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- d) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang

Fasilitasi Pembinaan Politik.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang;
- b) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif;
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
- d) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- e) Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;
- f) Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
- g) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

a.6 Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan;
- c) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- d) Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- e) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang;

- b) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
- c) Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi, kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d) Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
- e) Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
- f) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- g) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

a.7 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
- b) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
- c) Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
- d) Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;
- e) Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- c) Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;

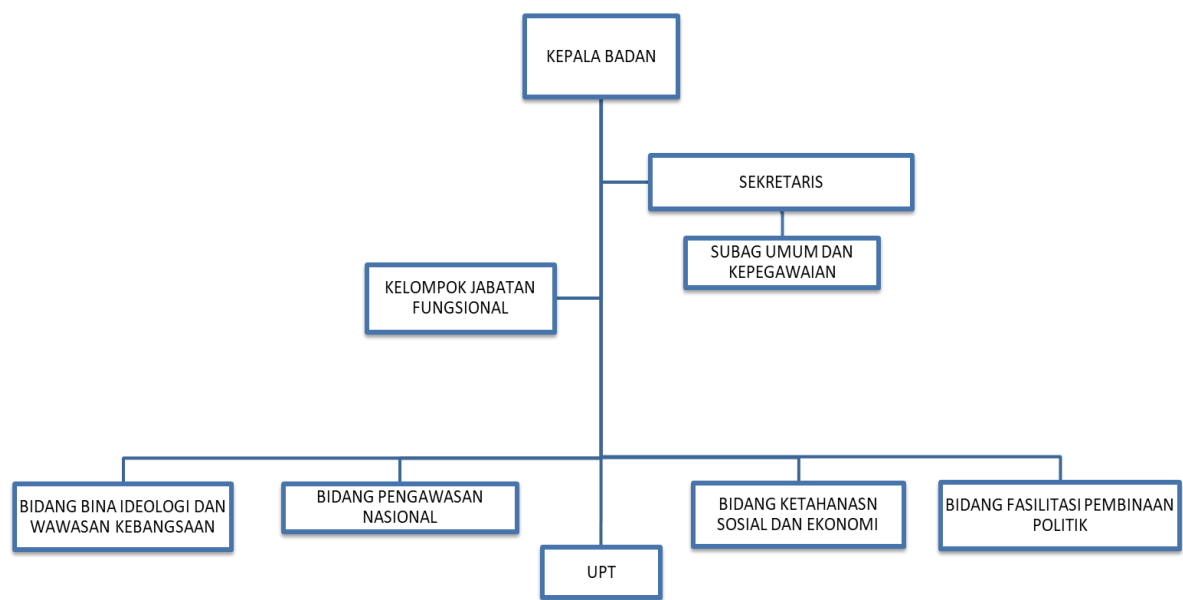
- d) Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
- e) Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
- f) Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
- g) Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
- h) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk di dalamnya bahwa secara struktural yang semula terdapat Jabatan Pengawas eselon IV, tetapi Pada Pasal 350A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Penyetaraan jabatan diatur dengan peraturan Menteri.

Selanjutnya secara teknis bahwa, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi penyetaraan ke dalam jabatan fungsional. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan Pelantikan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebelas (10) Orang eselon IV disetarakan ke jabatan fungsional dan Satu (1) orang masih menduduki Jabatan struktural eselon IV yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Bagan Struktur Pejabat Badan Kesbangpol Provinsi Banten setelah Penyetaraan dari eselon IV ke Jabatan Fungsional, setelah penyetaraan jabatan fungsional, dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
berdasrkan pasal 34 ayat 2 Permen PAN Nomor 17 Tahun 2021



b. Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada bulan Januari 2025, berjumlah 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 41 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan profil seperti dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Esselonering
(Data Januari 2025)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1	II	1	-	-	-	1	Plt. Kepala Badan
2	III	3	-	-	-	3	Sekretaris dan Kabid
3	IV	-	1	-	-	1	Kasubag Umpeg
4	Jabatan Fungsional	7	2	-	-	9	Perencana dan Analis Kebijakan
	Jumlah	11	3	-	-	14	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
(Data Januari 2025)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			TKS			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Kepala	1	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	9	8	17	22	3	25	42
3.	Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan	5	-	5	3	1	4	9
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional	4	-	6	2	2	4	10
5.	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	2	2	5	3	1	4	9
6.	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik	5	-	5	1	3	4	9
	Jumlah	26	10	36	31	10	41	77

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir
(Data Januari 2025)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	S 2	9	2	14	
2.	S 1	13	6	19	
3.	D 4	-	-	-	
3.	D3	-	-	-	
4.	D1	-	-	-	
5.	SLTA	4	2	6	
6.	SLTP	-	-	-	
7.	SD/SR	-	-	-	
	Jumlah	26	10	36	

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan
(Data Januari 2025)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	5	-	1	2	1	-	-	-	10
2.	III	1	-	1	1	-	4	11	1	19
3.	II	-	-	-	1	6	-	-	-	7
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	-	2	4	7	4	13	3	36

c. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menyajikan capaian kinerja pelayanan melalui tahap Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Hasil identifikasi dilihat dari Angka Indeks Demokrasi Indonesia

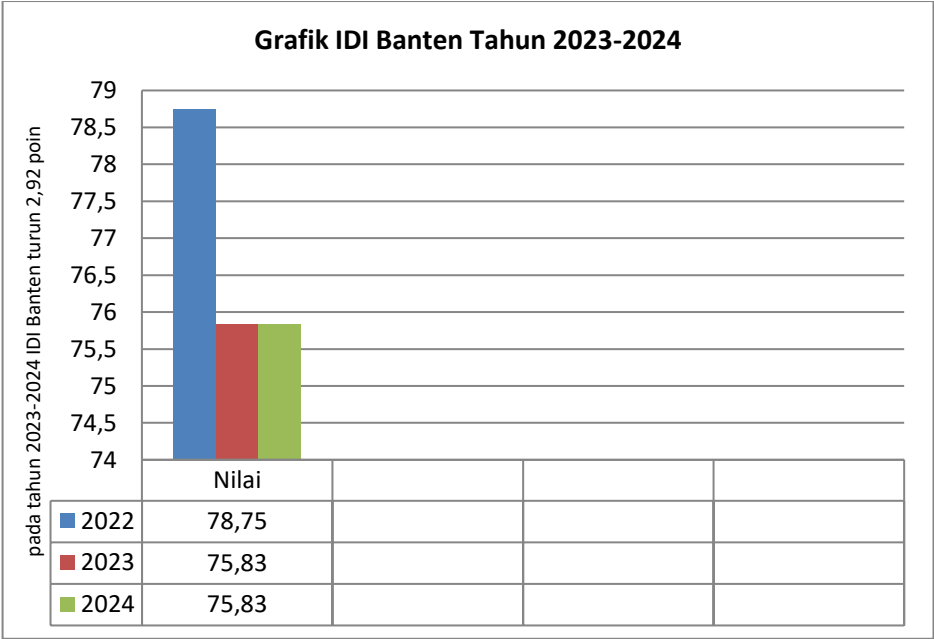
(IDI) dan Indeks Harmonisasi Indonesia (IHaI)

Selanjutnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Aspek Kebebasan;
- b. Aspek Kesetaraan;
- c. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Capaian (kondisi saat ini) berdasarkan data Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2023-2024, angka target capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten adalah 75,83 nilai, angka tersebut lebih rendah dari capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2022 dengan capaian 78,75 nilai. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023-2024 menurun 2,92 poin, dikarenakan belum dihapus pertauran perundangan yang ada di JDIH Banten yang dikelola oleh Biro Hukum Setda Banten terkait aturan sekolah dan larangan organisasi keagamaan serta tidak adanya laporan jumlah peraturan yang dikelola oleh Sekretarit Dewan Provinsi Banten yang mengurangi nilai Indeks Demokrasi Indonesia Banten.

Gambar 2.6
Grafik IDI Banten Tahun 2022-2024



Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Indeks Harmoni yang bertujuan untuk memperoleh gambaran harmoni Indonesia dari waktu ke waktu, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk harmoni Indonesia, menganalisa indikator yang mengalami pelemahan dan penurunan sebagai bahan evaluasi dan instrumen untuk penguatan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berbasis Evidence Based Data (EBD), dan sebagai dasar

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Indeks Harmoni adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan dalam suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Indeks ini biasanya mengukur berbagai dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi;
2. Dimensi Sosial;
3. Dimensi Budaya;
4. Dimensi Religius/ Keberagaman.

Pengukuran Indeks atas dimensi ini bertujuan untuk mengukur stabilitas ekonomi, sosial, keberagaman, dan toleransi antar kelompok di dalam masyarakat Indonesia. Indeks ini juga sering digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi situasi sosial, serta sebagai dasar untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam mempromosikan harmoni dan persatuan di tengah keragaman masyarakat. Sebagai warga dan sekaligus membangun, keserasian, keselarasan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Sasaran strategi ini baru akan dilaksanakan tahun 2025 ini. Selanjutnya pemerintah daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melaksanakan program Indeks Harmoni tersebut.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2023-2026 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.7

Selanjutnya upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Tabel 2.7 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2023-2026.

Tabel 2.7
Target Sasaran dan Program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Periode 2023 – 2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2023 - 2026 PROVINSI BANTEN

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET										RENCANA LOKASI	PENANG GUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
				2021	TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
41	42			43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24	26	378.000.000	26	400.000.000	26	400.200.000	26	401.200.000	26	401.200.000	Kota Serang	Kasubag PEP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	9	122.308.000	9	134.400.000	9	134.400.000	9	134.400.000	9	134.400.000	Kota Serang	Kasubag PEP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	Kota Serang	Kasubag PEP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubah an RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	1	5.900.000	Kota Serang	Kasubag PEP
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	900.000	1	1.900.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	Kota Serang	Kasubag PEP
Koordinasi dan	Terlaksananya	Jumlah Dokumen	Laporan	1	1	900.000	1		1		1		1		8 Kab/Kota	Kasubag

Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1.900.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		PEP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	9	127.800.000	9	130.000.000	9	130.000.000	9	130.000.000	9	130.000.000	8 Kab/Kota	Kasubag PEP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	114.292.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	8 Kab/Kota	Kasubag PEP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		39	35	11.009.190.000	48	11.033.690.000	48	11.033.690.000	48	11.033.690.000	48	11.033.690.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	12	10.530.000.000	12	10.530.000.000	12	10.530.000.000	12	10.530.000.000	12	10.530.000.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	12	449.190.000	12	449.190.000	12	449.190.000	12	449.190.000	12	449.190.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	7	7	9.500.000	7	9.500.000	7	9.500.000	7	9.500.000	7	9.500.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	2	2	14.925.000	2	14.925.000	2	14.925.000	2	14.925.000	2	14.925.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan

	Penyusunan															
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	5.575.000	2	5.575.000	2	5.575.000	2	5.575.000	2	5.575.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	-	-		12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-		1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	Kota Serang	Kasubag Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		67	77	348.669.050	77	348.669.050	77	348.669.050	77	348.669.050	77	348.669.050	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	98.350.000	1	98.350.000	1	98.350.000	1	98.350.000	1	98.350.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	2	85.104.050	2	85.104.050	2	85.104.050	2	85.104.050	2	85.104.050	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Pendidikan dan	Terlaksananya	Jumlah Pegawai	Orang	25	25		25		25		25		25		Kota Serang	Kasubag

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Umum dan Kepegawai an
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	12	28.340.000	12	28.340.000	12	28.340.000	12	28.340.000	12	28.340.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25	76.875.000	25	76.875.000	25	76.875.000	25	76.875.000	25	76.875.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum perangkat Daerah		3	3	771.439.440	3	1.004.176.900	3	1.004.176.900	3	1.004.176.900	3	1.004.176.900	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	296.475.440	1	304.490.900	1	304.490.900	1	304.490.900	1	304.490.900	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	Paket	1	1	224.000.000	1	224.000.000	1	224.000.000	1	224.000.000	1	224.000.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	250.964.000	1	475.686.000	1	475.686.000	1	475.686.000	1	475.686.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3	80	1.467.569.000	80	1.908.459.000	80	1.908.459.000	80	1.908.459.000	80	1.908.459.000		
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	111.800.000	1	111.800.000	1	111.800.000	1	111.800.000	1	111.800.000		

Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	39	976.214.000	39	976.214.000	39	976.214.000	39	976.214.000	39	976.214.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	40	379.555.000	40	820.445.000	40	820.445.000	40	820.445.000	40	820.445.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24	24	2.242.193.650	24	2.242.193.650	24	2.242.193.650	24	2.242.193.650	24	2.242.193.650		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listri	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	335.617.650	12	335.617.650	12	335.617.650	12	335.617.650	12	335.617.650	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.906.576.000	12	1.906.576.000	12	1.906.576.000	12	1.906.576.000	12	1.906.576.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	3	1.459.391.400	3	1.459.391.400	3	1.459.391.400	3	1.459.391.400	3	1.459.391.400		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	834.514.400	1	834.514.400	1	834.514.400	1	834.514.400	1	834.514.400	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	432.981.000	1	432.981.000	1	432.981.000	1	432.981.000	1	432.981.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawai an

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	191.896.000	1	191.896.000	1	191.896.000	1	191.896.000	1	191.896.000	Kota Serang	Kasubag Umum dan Kepegawaian
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		152	152	2.900.000.000	266	3.500.000.000	266	3.530.000.000	266	3.560.000.000	266	3.590.000.000		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	150	150	2.100.000.000	250	2.100.000.000	250	2.100.000.000	250	2.100.000.000	250	2.100.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan yang Disusun														n
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Lembaga	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	-	-	-	12	200.000.000	12	210.000.000	12	220.000.000	12	230.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	-	-	-	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan	Dokumen	-	-	-	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan

Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														garaan Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik	Jumlah Dokumen Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik														
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta		168	174	21.348.449.000	282	21.348.449.000	282	21.348.449.000	282	21.348.449.000	282	21.348.449.000		

Situasi Politik	Pemantauan Situasi Politik	Pemantauan Situasi Politik														
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	-	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Pembinaan Budaya Politik
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	-	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Fasilitas Organisasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Orang	12	12	19.538.449.000	12	19.538.449.000	12	19.538.449.000	12	19.538.449.000	12	19.538.449.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Fasilitas Organisasi Politik

Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150	150	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Pembinaan Budaya Politik
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	6	12	860.000.000	12	860.000.000	12	860.000.000	12	860.000.000	12	860.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Fasilitas Organisasi Politik

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		6	12	375.000.000	314	975.000.000	314	1.175.000.000	314	1.215.000.000	314	1.255.000.000		
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	-		1	150.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Organisasi Sosial
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang	Dokumen	-	-		1	150.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Organisasi Sosial

Daerah		Disusun														
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	-		150	150.000.000	150	200.000.000	150	210.000.000	150	220.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Organisasi Sosial
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	-		150	150.000.000	150	200.000.000	150	210.000.000	150	220.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Organisasi Sosial
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	6	12	375.000.000	12	375.000.000	12	375.000.000	12	375.000.000	12	375.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Organisasi Sosial
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN																

BUDAYA																	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			4	151	650.000.000	165	1.700.000.000	165	1.700.000.000	165	1.700.000.000	165	1.700.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	250.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	-	-	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	400.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KetahananEkono	Terlaksananya Kebijakan di Bidang KetahananEkono	Jumlah Orang yang Mengikuti PelaksanaanKebijakan di Bidang	Orang	1	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

mi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	mi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	3	150	400.000.000	150	400.000.000	150	400.000.000	150	400.000.000	150	400.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	-	-		12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
PROGRAM PENINGKATAN																

KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		19	30	24.190.024.000	30	24.490.024.000	30	24.490.024.000	30	24.490.024.000	30	24.490.024.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	-	1		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	8 Kab/Kota
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Dokumen	-	1		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	8 Kab/Kota

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun														Penanganan Konflik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	8	8	20.950.000.000	8	20.950.000.000	8	20.950.000.000	8	20.950.000.000	8	20.950.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Orang	7	7	615.326.000	7	615.326.000	7	615.326.000	7	615.326.000	7	615.326.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

an Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	3	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Fasilitas Penanganan Perbatasan dan Orang Asing
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	2.374.698.000	1	2.374.698.000	1	2.374.698.000	1	2.374.698.000	1	2.374.698.000	8 Kab/Kota	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

c. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah, instansi vertical dimanan diberikan layanan dalam rangka di fasilitasi berbentuk layanan hibah bansos guna membantu pemerintah daerah terkait jalannya pemebngunan, dan kelompok masyarakat seperti Ormas, LSM, OKP, mahasiswa, pelajar tingkat Priovinsi Banten, kelompok ini dalam rangka di berikan pembinaan dan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila agar terjaga keharmonisan dan meningkatnya demokrasi masyarakat Banten.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya, baik di tingkat daerah maupun pusat, bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini disusun oleh BPS dan Kemenkopolhukam, didukung oleh Bappenas, Kemendagri.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Keberadaan wawasan kebangsaan dan Pancasila sebagai tonggak penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa karena mengandung nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari UUD NKRI Tahun 1945 dan Pancasila. Dari nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai dasar pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan mengacu pada pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara yang beragam.

3. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara makro terlihat secara kasat mata bahwa terdapat berbagai ancaman yang dapat berimplikasi pada

lemahnya rasa persatuan dan kesatuan antar komponen bangsa yang sangat terasa dihadapi oleh bangsa ini.

Selanjutnya kita sebagai bangsa yang besar dengan catatan-catatan sejarah yang telah ditempuh oleh Bangsa Indonesia harus bersikap optimis dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang dan akan terjadi, sehingga Bangsa Indonesia khususnya Provinsi Banten dapat meningkatkan capaian angka Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi, Angka aspek-aspek tersebut akhirnya terangkum dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Semakin tinggi angka capaian IDI dapat menggambarkan kondisi stabilitas negara / daerah yang apabila capaian IDI dalam angka skala yang baik, Bangsa Indonesia dapat berakselerasi melaksanakan pembangunan berlandaskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

a. Permasalahan

Perumusan permasalahan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) melibatkan identifikasi dan analisis isu-isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini.

Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan dari pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten samapai dengan tahun 2024 sebagaimana terurai pada sub judul kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas, telah diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Wawasan kebangsaan pada peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan belum optimal;
- 2) Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan belum optimal;
- 3) Peran partai politik dan lembaga perndidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik belum optimal;
- 4) Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan belum optimal;
- 5) Peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah belum optimal;

- 6) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya belum optimal;
- 7) Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial belum optimal.

b. Isu strategis

Isu strategis dalam Renstra (Rencana Strategis) adalah masalah atau tantangan penting yang harus diatasi untuk mencapai visi dan misi organisasi atau instansi. Isu ini menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya Isu strategis adalah masalah atau tantangan yang bersifat mendasar dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Isu strategis dalam Renstra merupakan elemen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Dengan mengidentifikasi dan menanggulangi isu strategis, organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada kemajuan daerah atau sektor terkait.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam menyusun Renstra tahun 2025-2029 ini merumuskan isu strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan wawasan kebangsaan pada peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- 2) Meningkatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter;
- 3) Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 5) Meningkatkan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah;
- 6) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- 7) Meningkatkan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Untuk mencapai Tujuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, Dan Ham”. Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, tahun 2025-2029 merupakan tahun pertama dari RPJMD, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, adalah **”Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”**, dalam mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 telah dirumuskan salah satu misi pembangunan, adalah **“Memperkokoh Iman Dan Takwa Melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia Melalui Pendidikan Anti Korupsi Serta Moralitas Etika yang Luhur”**.

2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Selanjutnya sasaran Rencana Strategis/Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, menetapkan sasaran yang ingin di capai dalam periode 2025-2029, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan.
- 2) Meningkatnya kerukunan kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya pada Rencana Strategis/Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Banten menyajikan tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (Lima) tahun.

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Tahun 2025-2029

VISI	”BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI”				
MISI 6	Memperkokoh Iman dan Takwa Melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Melalui Pendidikan Anti Korupsi serta Moralitas Etik yang Luhur				
NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan				

	Pancasila, Demokrasi, dan HAM				
2		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Capaian SAKIP perangkat daerah		
		Meningkatnya kerukunan kehidupan bermasyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	1. Meningkatkan Kesadaran Ideologi Pancasila melalui berbagai metode (sekolah, masyarakat, ormas). 2. Meningkatkan Pemahaman politik yang berkelanjutan melalui pendidikan politik. 3. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis untuk organisasi kemasyarakatan (ormas). 4. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 5. Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial.	1. Peningkatan Internalisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat 2. Peningkatan Pemahaman Politik melalui Pendidikan Politik yang berkelanjutan dan Penguatan Peran Partai Politik dalam Pembinaan Kader. 3. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui Peningkatan Kapasitas. 4. Peningkatan Penerapan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keberagamaan 5. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial

3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama 5 (Lima) tahun mendatang (Tahun 2025-2029). Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Sandingan strategi daerah dengan strategi Perangkat Daerah Strategi Perangkat Daerah berhubungan dengan strategi Daerah sebaliknya dengan Arah kebijakan arah kebijakan perangkat daerah dalam renstra diturunkan kembali menjadi arah kebijakan tahunan renstra yang mana menjadi cikal bakal program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sama dengan strategi yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Meningkatkan Kesadaran Ideologi Pancasila melalui berbagai metode (sekolah,

masyarakat, ormas).

4. Meningkatkan Pemahaman politik yang berkelanjutan melalui pendidikan politik.
5. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
6. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
7. Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial.

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah adalah pedoman atau panduan yang digunakan dalam implementasi strategi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini adalah rumusan perencanaan yang komprehensif dan harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan harus merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah.

Arah kebijakan menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah kebijakan membantu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara terarah dan efisien, termasuk perencanaan, penganggaran, keuangan, aset, infrastruktur, dan sumber daya alam. Arah kebijakan membantu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengukur kinerja pelaksanaan tugas.

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sama dengan arah kebijakan yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Peningkatan Internalisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat
- 2) Peningkatan Pemahaman Politik melalui Pendidikan Politik yang berkelanjutan dan Penguatan Peran Partai Politik dalam Pembinaan Kader
- 3) Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui Peningkatan Kapasitas
- 4) Peningkatan Penerapan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keberagamaan
- 5) Peningkatan Kualitas Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

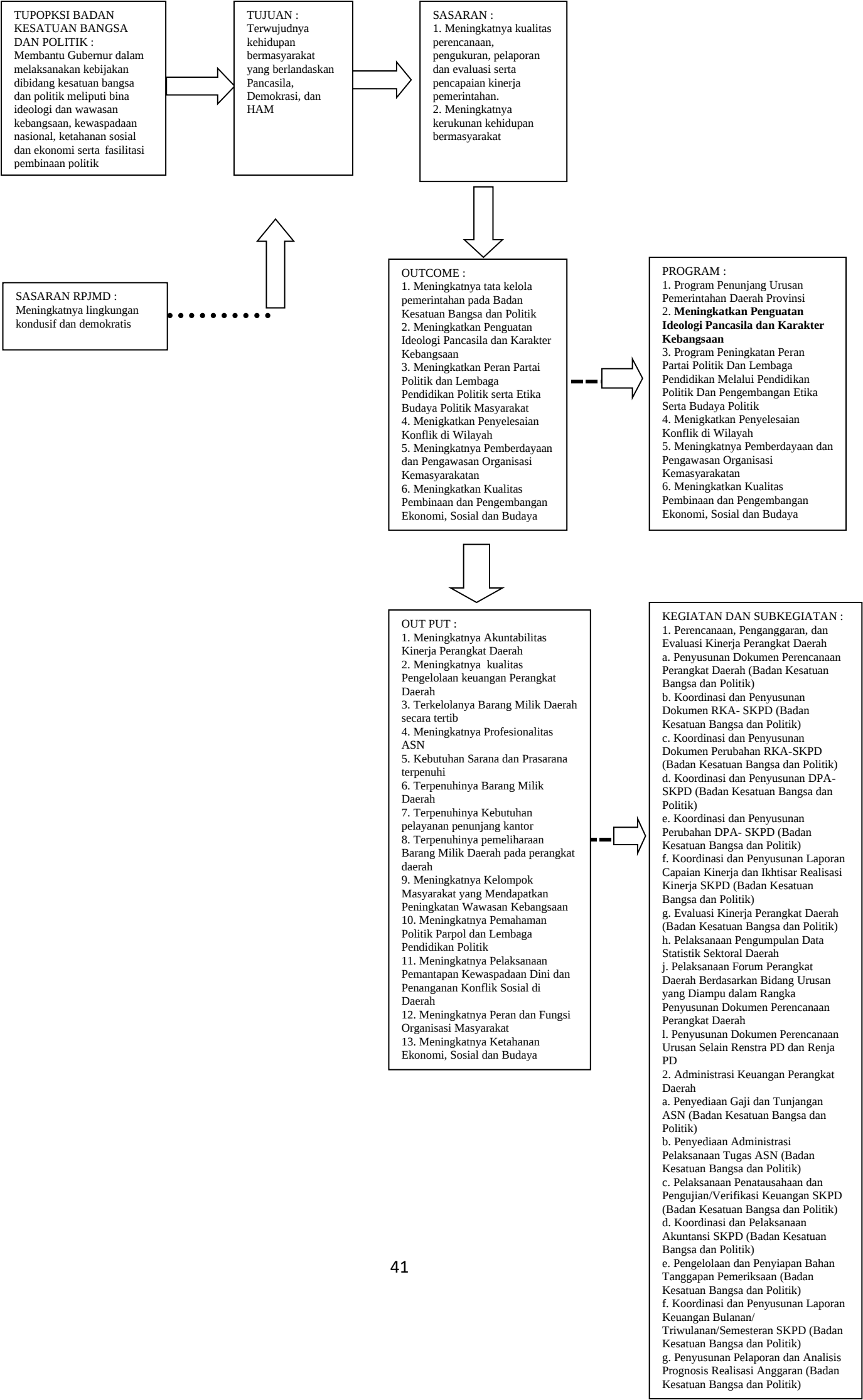
1. Uraian Program

Program kerja adalah rencana sistematis yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Program kerja berfungsi sebagai pedoman atau panduan bagi organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Intervensi pembangunan pemerintah, baik yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah terdiri dari program dan kegiatan pembangunan. Masing-masing program yang kemudian dijabarkan dalam 1 kegiatan atau lebih mencerminkan rangkaian aktivitas untuk menghasilkan beberapa output dan outcome tertentu. Dengan pendekatan *framework logis*/kerangka logis, satu atau lebih output merupakan sarana untuk mencapai suatu outcome. Pada gilirannya, satu atau lebih outcome diorientasikan untuk mencapai suatu *impact*/dampak/pengaruh pembangunan dalam suatu *segmen*/sekumpulan data sasaran. Oleh karenanya, dalam menyusun suatu dokumen perencanaan, khususnya yang berjangka menengah, suatu kegiatan (yang berorientasi output) pada prinsipnya merupakan *breakdown*/dirinci dari suatu program (berorientasi outcome), dan seterusnya program merupakan *breakdown* dari sasaran pembangunan (kurang lebih berorientasi pada *impact* atau *immediate impact/berdampak langsung*).

Namun demikian, nomenklatur program dan kegiatan yang saat ini diadopsi oleh instansi pemerintah tidak bersumber an-sich dari hasil analisis piramida menurunkan visi-misi dalam tujuan dan sasaran pembangunan, lalu turun lagi dalam program dan kegiatan. Sebagian besar nomenklatur program dan kegiatan tersebut *given*. Darimana asalnya? Satu faktor yang krusial untuk dimasukan adalah nomenklatur urusan pemerintah yang meliputi urusan pemerintah pusat dan urusan konkruen yang dijalankan dengan pemerintah daerah. Lebih lanjut, urusan yang diampu pemerintah daerah berdasarkan UU Pemerintah Daerah terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib lebih jauh dibagi lagi dalam sub-kategori layanan dasar dan bukan layanan dasar. Masing-masing kategori urusan tersebut dibagi lagi kedalam masing-masing urusan yang bersifat sektoral, misalkan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Pada dasarnya pemetaan atau klasifikasi urusan-urusan ini belumlah secara detail ter *break-down* kedalam program dan kegiatan. Namun setidaknya sangat berkontribusi dalam membentuk nomenklatur program kegiatan, dimana masing-masing urusan, terdiri dari 1 atau lebih program berdasarkan luas cakupan urusan yang dihandle pada masing-masing instansi pemerintah.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program Renstra
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Banten



1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - b. Penyediaan Bahan/Material (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

g. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

h. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

i. Pelaksanaan tugas Paskibraka

j. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila

k. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

l. Pembentukan Paskibraka

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

c. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

d. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

2. **Uraian Kegiatan**

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan-kegiatan pada setiap program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penunjang
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Kegiatan Prioritas
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
 - 3) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 4) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 5) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2025-2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2025-2029. Program dan Kinerja Program serta Kegiatan dan Kinerja Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
MENINGKATNYA LINGKUNGAN KONDUSIF DAN DEMOKRATIS	TERWUJUDNYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG BERLANDASKAN PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAM						
		MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, PELAPORAN DAN EVALUASI SERTA PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (%)	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
					JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH (DOKUMEN)	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD (DOKUMEN)	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD (DOKUMEN)	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	

					LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD (DOKUMEN)	(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA- SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD (DOKUMEN)	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (LAPORAN)	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (LAPORAN)	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH YANG TELAH DIKUMPULKAN DAN DIPERIKSA LINGKUP PERANGKAT DAERAH (LAPORAN)	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	
					JUMLAH BERITA ACARA HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	
					JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD (DOKUMEN)	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN URUSAN SELAIN RENSTRA PD DAN RENJA PD	
				MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERCAPIAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (%)	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	

					JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN (ORANG/ BULAN)	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN (DOKUMEN)	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD (DOKUMEN)	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD (DOKUMEN)	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD (LAPORAN)	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN(DOKUMEN)	PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD (LAPORAN)	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN (DOKUMEN)	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
				TERKELOLANYA BARANG MILIK	PERSENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA	

				DAERAH SECARA TERTIB	MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH (%)	PERANGKAT DAERAH	
					JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD (DOKUMEN)	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	
					JUMLAH LAPORAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD (LAPORAN)	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	
					JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD (LAPORAN)	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	
				MENINGKATNYA PROFESIONALITAS ASN	PERSENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH (%)	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
					JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN (PAKET)	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (DOKUMEN)	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (DOKUMEN)	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (DOKUMEN)	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (ORANG)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-	

					SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ORANG)	UNDANGAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ORANG)	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
				KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TERPENUHI	PERSENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (%)	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
					JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN (PAKET)	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH PAKET BAHAN/MATERIAL YANG DISEDIAKAN (PAKET)	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU (LAPORAN)	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (LAPORAN)	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD (DOKUMEN)	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)	
					JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD (DOKUMEN)	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	
				TERPENUHINYA BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (%)	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	

					JUMLAH UNIT KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DISEDIAKAN (SATUAN)	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	
					JUMLAH UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DISEDIAKAN (SATUAN)	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	
					JUMLAH PAKET MEBEL YANG DISEDIAKAN (PAKET)	PENGADAAN MEBEL	
					JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN (SATUAN)	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	
				TERPENUHINYA KEBUTUHAN PELAYANAN PENUNJANG KANTOR	PERSENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
					JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (LAPORAN)	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
					JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN (LAPORAN)	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
					JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN (LAPORAN)	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
					JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN (LAPORAN)	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	
				TERPENUHINYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT	PERSENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	

				DAERAH			
					JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA (UNIT)	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	
					JUMLAH ASET TETAP LAINNYA YANG DIPELIHARA (UNIT)	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	
					JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI (UNIT)	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	
		MENINGKATNYA KERUKUNAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				MENINGKATNYA KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE CAPAIAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
					JUMLAH DOKUMEN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN YANG DISUSUN (DOKUMEN)	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	
					JUMLAH KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN	

					IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN YANG DISUSUN (DOKUMEN)	SEJARAH KEBANGSAAN	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN (ORANG)	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	
					JUMLAH LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN (LAPORAN)	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN SEJARAH KEBANGSAAN	
					JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA (DOKUMEN)	PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	
					JUMLAH PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	PENGANGKATAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	

					(ORANG)		
					LAPORAN HASIL PEMBINAAN AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN PURNAPASKIBRAKA (DOKUMEN)	PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA	
					JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA (DOKUMEN)	PELAKSANAAN TUGAS PASKIBRAKA	
					LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA (DOKUMEN)	PELAKSANAAN TUGAS PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	
					LAPORAN HASIL PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA (DOKUMEN)	PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	
					JUMLAH PASKIBRAKA (ORANG)	PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	
			MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK		PERSENTASE PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				MENINGKATNYA PEMAHAMAN POLITIK PARPOL DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK	PERSENTASE CAPAIAN PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK (%)	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	
					JUMLAH DOKUMEN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH,	

					DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH YANG DISUSUN	SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	
					JUMLAH KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH YANG DISUSUN	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH (ORANG)	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	
					JUMLAH LAPORAN HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN	

					POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH (LAPORAN)	DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	
			MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG AKTIF	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				MENINGKATNYA PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI MASYARAKAT	PERSENTASE CAPAIAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (%)	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
					JUMLAH DOKUMEN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH YANG DISUSUN (DOKUMEN)	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	
					JUMLAH KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH YANG DISUSUN (DOKUMEN)	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH (ORANG)	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	

					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KOORDINASI DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH (ORANG)	PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	
					JUMLAH LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH (LAPORAN)	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	
			MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT		PERSENTASE KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DILAKSANAKAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	PERSENTASE CAPAIAN PEMBINAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (%)	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
					JUMLAH DOKUMEN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DISUSUN (DOKUMEN)	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	
					JUMLAH KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN	

					PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DISUSUN (DOKUMEN)	PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH (ORANG)	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH(ORANG)	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	
					JUMLAH LAPORAN HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH (LAPORAN)	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	
			MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN		PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				MENINGKATNYA PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN	PRESENTASE KETERCAPAIAN KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN	

				DINI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH	PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (%)	NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
					JUMLAH DOKUMEN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH YANG DISUSUN (DOKUMEN)	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	
					JUMLAH KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH YANG DISUSUN (DOKUMEN)	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH (ORANG)	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	
					JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI	

					LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH (ORANG)	KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	
					JUMLAH LAPORAN HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH (LAPORAN)	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	
					JUMLAH DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI (DOKUMEN)	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	

3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Uraian sub kegiatan adalah penjelasan rinci tentang tahapan atau bagian-bagian dari suatu kegiatan yang lebih besar. Sub kegiatan biasanya merupakan bagian-bagian yang lebih spesifik dan terstruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan utama. Uraian sub kegiatan memberikan detail tentang apa yang akan dilakukan dalam setiap tahap atau bagian tertentu dari kegiatan. Uraian sub kegiatan membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan secara lebih efektif.

Selanjutnya kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) merujuk pada tingkat keberhasilan suatu dinas/badan atau unit kerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kinerja OPD dinilai berdasarkan indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan hasil-hasil konkret yang dicapai. Kinerja OPD adalah ukuran sejauh mana suatu OPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, baik dalam hal kuantitas, kualitas, efisiensi, dan efektivitas.

Selanjutnya Indikator sub kegiatan adalah ukuran terukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu sub kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini membantu mengukur efektivitas dan efisiensi suatu sub kegiatan, serta memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan sub kegiatan tercapai. Indikator sub kegiatan berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian sub kegiatan, sehingga dapat digunakan untuk:

- a. Mengukur efektivitas dan efisiensi, indikator membantu menentukan apakah suatu sub kegiatan berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya
- b. Membandingkan kinerja, Indikator memungkinkan untuk membandingkan kinerja sub kegiatan dari waktu ke waktu atau dengan sub kegiatan lain yang serupa
- c. Mendukung pengambilan keputusan, Data yang diperoleh dari indikator dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sub kegiatan
- d. Memperbaiki kinerja, Indikator membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaan sub kegiatan.

Selanjutnya kinerja dalam Rencana Strategis merujuk pada pengukuran dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kinerja ini dievaluasi melalui indikator kinerja, yang menjadi ukuran keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai target yang telah direncanakan. Sedangkan Pagu indikatif dalam Renstra (Rencana Strategis) adalah perkiraan atau ancar-ancar dana yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran suatu instansi pemerintah. Pagu indikatif ini menjadi pedoman bagi instansi untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan prioritasnya.

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OU TPUT	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KONDISI AKHIR
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						70.569.916.000		72.918.524.000		77.110.910.000		785.926.177.000		87.674.035.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				22.734.539.000		23.491.158.000		24.841.761.000		27.801.702.000		28.244.738.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	424.835.000	100%	443.954.000	100%	471.954.000	100%	628.119.000	100%	481.954.000	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2	2	110.100.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	172.308.000	2	140.000.000	10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	1	3.900.000	5
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	5
Koordinasi dan		Jumlah Dokumen		1	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	1	4.900.000	5

Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2	2	28.200.000	2	28.200.000	2	30.200.000	2	154.365.000	2	30.200.000	10
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		9	9	125.518.000	9	125.518.000	9	135.518.000	9	125.210.000	9	135.518.000	45
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah		Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Laporan)		1	1	22.460.000	1	30.460.000	1	32.460.000	1	32.460.000	1	32.460.000	5
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	1	32.960.000	1	32.960.000	1	34.960.000	1	34.960.000	1	34.960.000	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD (Dokumen)		1	1	86.997.000	1	88.216.000	1	90.216.000	1	90.216.000	1	90.216.000	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)	100%	100%	100%	13.920.810.000	100%	14.085.310.000	100%	14.247.310.000	100%	14.397.310.000	100%	14.505.310.000	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		38	38	13.221.140.000	38	13.321.140.000	38	13.421.140.000	38	13.521.140.000	38	13.621.140.000	38
Penyediaan		Jumlah Dokumen Hasil		12	12	513.670.000	12	563.670.000	12	613.670.000	12	663.670.000	12	671.670.000	60

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	12	27.488.000	12	30.488.000	12	32.488.000	12	32.488.000	12	32.488.000	60
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		12	12	29.580.000	12	32.580.000	12	34.580.000	12	34.580.000	12	34.580.000	60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	1	40.000.000	1	43.500.000	1	45.500.000	1	45.500.000	1	45.500.000	5
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan(Dokumen)		1	1	40.400.000	1	45.400.000	1	47.400.000	1	47.400.000	1	47.400.000	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		18	18	30.900.000	18	30.900.000	18	32.900.000	18	32.900.000	18	32.900.000	90
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1	1	17.632.000	1	17.632.000	1	19.632.000	1	19.632.000	1	19.632.000	5
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	70.000.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	103.000.000	100%	111.000.000	100%
Penyusunan		Jumlah Rencana		2	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	41.000.000	2	46.000.000	10

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)													
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	35.000.000	5
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	100%	100%	425.437.080	100%	476.437.080	100%	515.437.080	100%	533.437.080	100%	547.437.080	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1	1	197.300.000	1	225.300.000	1	235.300.000	1	250.300.000	1	250.300.000	5
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1	1	20.496.000	1	25.496.000	1	30.496.000	1	31.496.000	1	33.496.000	5
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1	1	45.360.000	1	50.360.000	1	55.360.000	1	57.360.000	1	58.360.000	5
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	49.680.000	1	53.680.000	1	57.680.000	1	57.680.000	1	58.680.000	5
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		25	25	12.912.000	25	15.912.000	25	20.912.000	25	20.912.000	25	25.912.000	125
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi		25	25	23.120.000	25	25.120.000	25	30.120.000	25	30.120.000	25	35.120.000	125

(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		77	77	76.569.080	77	80.569.080	77	85.569.080	77	85.569.080	77	85.569.080	385
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (%)	100%	100%	100%	1.034.528.900	100%	1.136.528.900	100%	1.191.528.900	100%	1.361.528.900	100%	1.461.528.900	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	340.765.400	1	380.765.400	1	405.765.400	1	405.765.400	1	435.765.400	5
Penyediaan Bahan/Material (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	200.000.000	5
Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	60
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	12	419.463.500	12	430.463.500	12	440.463.500	12	600.463.500	12	600.463.500	60
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		12	12	49.300.000	12	55.300.000	12	60.300.000	12	60.300.000	12	60.300.000	60
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100%	550.000.000	100%	710.000.000	100%	840.000.000	100%	3.095.000.000	100%	3.120.000.000	100%
Pengadaan Kendaraan		Jumlah Unit Kendaraan		1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Satuan)													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan)		1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	5
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		1	1	100.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan)		1	1	250.000.000	1	280.000.000	1	290.000.000	1	295.000.000	1	320.000.000	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	100%	4.447.955.920	100%	4.621.955.920	100%	5.193.558.920	100%	5.293.558.920	100%	5.423.558.920	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1	187.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	832.560.000	12	900.560.000	12	1.100.560.000	12	1.200.560.000	12	1.220.560.000	60
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	604.428.000	12	650.428.000	12	700.428.000	12	700.428.000	12	700.428.000	60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	2.823.967.920	12	2.870.967.920	12	3.142.570.920	12	3.142.570.920	12	3.252.570.920	60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	100%	1.860.972.100	100%	1.931.972.100	100%	2.281.972.100	100%	2.389.748.100	100%	2.593.949.100	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan		29	29	889.080.100	29	900.080.100	29	1.100.080.100	29	1.100.080.100	29	1.280.080.100	29

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya (Unit)													
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		105	105	579.996.000	105	600.996.000	105	700.996.000	105	750.996.000	105	775.197.000	105
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	391.896.000	1	430.896.000	1	480.896.000	1	538.672.000	1	538.672.000	1
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4.391.094.000	6 Kab/Kota	4.537.232.000	8 Kab/Kota	4.798.097.000	8 Kab/Kota	6.441.567.000	8 Kab/Kota	5.455.369.000	100
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)		100%	100%	4.391.094.000	100%	4.537.232.000	100%	4.798.097.000	100%	6.441.567.000	100%	5.455.369.000	100%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dokumen)		1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	203.802.000	5
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dokumen)		4	4	303.744.000	4	350.744.000	4	400.744.000	4	400.744.000	4	420.744.000	20
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,		250	300	837.436.000	350	887.436.000	400	987.436.000	450	1.587.436.000	500	987.436.000	2000

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		150	180	191.815.000	200	191.815.000	220	211.815.000	250	211.815.000	280	211.815.000	1130
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)		3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)		2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)		500	500	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	500	200.000.000	500	210.000.000	2500
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)		1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	5
Pelaksanaan tugas Paskibraka		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas		4	4	1.908.099.000	4	1.907.237.000	4	1.948.102.000	4	2.541.572.000	4	2.041.572.000	20

		Paskibraka (Dokumen)													
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	5
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000	10
Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka (Orang)		80	80	450.000.000	80	450.000.000	80	450.000.000	80	500.000.000	80	550.000.000	400
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	N/A	20%	40%	33.867.014.000	60%	34.994.128.000	80%	37.006.084.000	100%	698.006.127.000	100%	42.075.405.000	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Pemahaman Politik Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik	Persentase Capaian Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (%)		100%	100%	33.867.014.000	100%	34.994.128.000	100%	37.006.084.000	100%	698.006.127.000	100%	42.075.405.000	100%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum		1	1	91.890.000	1	120.890.000	1	130.890.000	1	437.300.000	1	200.890.000	5

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun													
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		1	1	101.274.000	1	191.274.000	1	201.274.000	1	1.245.600.000	1	350.274.000	5
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		300	400	33.476.794.000	500	34.370.908.000	650	36.342.864.000	700	693.791.282.000	750	40.993.185.000	3000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		100	120	98.312.000	140	180.312.000	160	190.312.000	180	1.262.085.000	200	280.312.000	800

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)													
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)		2	2	98.744.000	2	130.744.000	2	140.744.000	2	1.269.860.000	2	250.744.000	10
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	20%	40%	2.195.547.000	60%	2.268.616.000	80%	2.399.049.000	100%	4.670.784.000	100%	2.727.685.000	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Peran dan Fungsi Organisasi Masyarakat	Persentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)		100%	100%	2.195.547.000	100%	2.268.616.000	100%	2.399.049.000	100%	4.670.784.000	100%	2.727.685.000	100%
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)		1	1	33.376.000	1	43.445.000	1	49.445.000	1	49.445.000	1	50.445.000	5
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan		Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan		2	2	140.160.000	2	160.160.000	2	180.160.000	2	210.160.000	2	220.160.000	10

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)													
Pelaksanaan Kebijakan Dibi- dang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibi- dang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		450	500	1.969.491.000	550	1.989.491.000	600	2.078.924.000	650	4.290.659.000	700	2.310.560.000	3000
Pelaksanaan Koordinasi Dibi- dang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibi- dang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		50	70	25.504.000	90	40.504.000	110	45.504.000	130	60.504.000	150	73.504.000	550
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibi- dang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibi- dang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		1	1	27.016.000	1	35.016.000	1	45.016.000	1	60.016.000	1	73.016.000	5
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	N/A	100%	100%	439.110.000	100%	453.724.000	100%	479.810.000	100%	534.157.000	100%	545.537.000	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	100%	439.110.000	100%	453.724.000	100%	479.810.000	100%	534.157.000	100%	545.537.000	100%

Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		(%)													
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)		2	2	35.643.000	2	38.643.000	2	40.643.000	2	54.990.000	2	56.990.000	10
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)		1	1	30.203.000	1	33.203.000	1	35.203.000	1	45.203.000	1	47.203.000	5
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		100	250	230.699.000	300	233.699.000	350	248.785.000	400	258.785.000	450	260.785.000	1750
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di		110	130	97.148.000	150	100.148.000	160	105.148.000	180	115.148.000	200	117.148.000	820

Penghayat Kepercayaan di Daerah		Daerah(Orang)													
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)		1	1	45.417.000	1	48.031.000	1	50.031.000	1	60.031.000	1	63.411.000	5
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	91,67%	100%	100%	6.942.612.000	100%	7.173.666.000	100%	7.586.109.000	100%	48.471.840.000	100%	8.625.301.000	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)		100%	100%	6.942.612.000	100%	7.173.666.000	100%	7.586.109.000	100%	48.471.840.000	100%	8.625.301.000	100%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	90.000.000	1	40.000.000	5
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,		1	1	32.850.000	1	52.850.000	1	72.850.000	1	130.850.000	1	90.850.000	5

di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)													
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		300	400	4.217.282.000	450	4.368.336.000	500	4.590.779.000	550	45.353.510.000	600	5.471.971.000	2500
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		80	100	110.080.000	30	150.080.000	30	190.080.000	30	195.080.000	30	200.080.000	220
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,		1	1	80.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)													
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)		1	1	2.482.400.000	1	2.482.400.000	1	2.582.400.000	1	2.582.400.000	1	2.702.400.000	5

4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Istilah prioritas diartikan sebagai keadaan ketika seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Menentukan prioritas dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting dilakukan agar kita bisa teratur dalam melakukan aktivitas

Uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah, serta mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Subkegiatan ini merupakan implementasi dari program prioritas, dan dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan daya saing daerah.

Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah mencakup berbagai aktivitas yang spesifik dan terukur, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Subkegiatan ini dirancang untuk selaras dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah

Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat di masing- masing strategi untuk menunjukkan cerita strategi dan kelogisannya mencapai sasaran terkait.

Dengan pelaksanaan subkegiatan yang terencana dan terukur, diharapkan program prioritas pembangunan daerah dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat daerah. Sehingga Program-program prioritas sebagaimana dalam tabel 4.4 merupakan program yang akan dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai target indikator pertahunnya. Tabel 4.4 menyajikan rencana program prioritas dengan disertai tersebut, berisi uraian lengkap mengenai Bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik program Prioritas Pembangunan yang akan dijalankan, Indikator Kinerja program (outcome), Capaian Kinerja Program/kegiatan selama Lima Tahun tahun.

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam mendukung daerah, Badan Kesatuan Bngsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025-2029, ditetapkan kegiatan dan Subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk dalam mendukung pembangunan daerah, sebagaimana dirumuskan pada tabel :

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			Pelaksanaan tugas Paskibraka	
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Pembentukan Paskibraka	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	

			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	

			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Menigkatkan Penyelesaian Konflik di Wilayah	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	

			Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran merujuk pada pengukuran tingkat kesuksesan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan adalah visi jangka panjang atau hasil akhir yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah langkah-langkah spesifik, terukur, dan terikat waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan pencapaian dapat diukur melalui indikator kinerja yang relevan dengan sasaran, seperti indikator kualitas, kuantitas, efisiensi, dan waktu.

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lebih panjang. Contoh: Meningkatkan kualitas Indeks Harmonisasi Indonesia/IHaI, meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia/IDI Banten. Target Keberhasilan merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Target ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan. Indikator kinerja merupakan parameter atau ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran. Indikator kinerja yang baik harus dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran, dan mudah dipahami.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Selaras dengan tujuan Misi ke 4 RPJMD Provinsi Banten 2025- 2029 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan tujuan strategik **“Memperkokoh iman dan takwa melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui pendidikan anti korupsi serta moralitas etik yang luhur”** dengan indikator tujuan **terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, demokrasi dan HAM**. Dalam mewujudkan tujuan tersebut sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2025, Sasaran yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah: a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan. b) Meningkatnya kerukunan kehidupan bermasyarakat.

Adapun Indikator Kinerja Utama/IKU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH	Persen (%)	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
2.	INDEKS HARMONI INDONESIA (IHaI)	Nilai	7,13	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00	7,00

6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kunci (IKK)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 3 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:

- a. pendidikan menengah;
- b. pendidikan khusus;
- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
- i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Selanjutnya Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/SPM oleh Daerah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), selanjutnya ayat (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, dan termasuk pada klasifikasi Organisasi Perangkat Daerah pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, serta tidak terdapat dalam penerapan standar pelayanan minimal yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021.

BAB V

ENUTUP

Penyusunan Renstra/Rencana Strategis. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh suatu organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu tertentu atau lima tahun. Renstra dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok adalah “Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”.

Selaras dengan tujuan Misi ke 4 RPJMD Provinsi Banten 2025- 2029 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan tujuan strategik “Memperkokoh iman dan takwa melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui pendidikan anti korupsi serta moralitas etik yang luhur” dengan indikator tujuan terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, demokrasi dan HAM. Dalam mewujudkan tujuan tersebut sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2025, Sasaran yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah:

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan.
- b) Meningkatnya kerukunan kehidupan bermasyarakat.